

FUNGSI PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERDAMPAK COVID 19 DESA TIMORENG PANUA

¹Siti Nurhalisa, ²Muh. Rohady Ramadhan, ³Andi Dwi Resqi Pramana, ⁴Andi Riska Andreani S.,
⁵Damayanti Trisnasari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

nurhalisa221198@gmail.com

andireski71@gmail.com

riska.andreani93@gmail.com

damayantitrisnasari@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pemerintahan di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk mengetahui fungsi pemerintahan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terdampak covid 19 di Desa Timoreng Panua. Populasi penelitian ini berjumlah 146 orang, sedangkan sampel penelitian menggunakan random sampling total yaitu 73 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Observasi, Wawancara, Studi Pustaka dan Kuisiner. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi dan persentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintahan di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidenreng Rappang di nilai cukup baik dengan hasil rata-rata persentase, yaitu 74,12%. fungsi pemerintahan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terdampak covid 19 di Desa Timoreng Panua dinilai cukup baik dengan hasil rata-rata persentase, yaitu 82,02%. Adapun hasil regresi linear sederhana didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel X fungsi pemerintahan terhadap variabel Y peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 86%.

Kata Kunci: Fungsi Pemerintahan, Peningkatan Kesejahteraan

Abstract

The purpose of the study was to determine the implementation of government functions in Timoreng Panua Village, Sidenreng Rappang Regency and to determine the function of government to improve the welfare of the people affected by COVID-19 in Timoreng Panua Village. The population of this study amounted to 146 people, while the research sample used a total random sampling of 73 people. Data collection techniques in this study used the techniques of Observation, Interview, Literature Study and Questionnaire. The research method uses descriptive qualitative. The data were then analyzed using frequency and percentage tables. The results of this study indicate that the implementation of government functions in Timoreng Panua Village, Sidenreng Rappang Regency is considered quite good with an average percentage of 74.12%. The function of government to improve the welfare of the people affected by COVID-19 in Timoreng Panua Village is considered quite good with an average percentage result, which is 82.02%. The results of simple linear regression showed that there was a significant effect of variable X on government functions on variable Y, increasing people's welfare by 86%.

Keywords : Government Functions, Welfare Improvement

A. PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Tujuan dari pemerintah dikatakan oleh Ateng Syafrudin (2016: 10): Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar.

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan pelayanan social dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan social yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Definisi-definisi di atas mengandung pengertian bahwa kesejahteraan social mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi dan spiritual.

Sehubungan dengan hal kesejahteraan semenjak dengan adanya covid 19 ini di Desa Timoreng Panua tingkat kesejahteraan masyarakat dari hari kehari semakin berkurang hal ini dikarenakan susahnya untuk melakukan hubungan dengan orang lain hal ini menimbulkan persoalan dalam hal mencari nafkah bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. jumlah masyarakat miskin yang ada sebelum adanya pandemic covid 19 ini berjumlah 84 orang dengan jumlah penerima program keluarga harapan (PKH) sebanyak 46 orang sedangkan jumlah penerima program mandiri seanyak 34 orang, namun setelah merebaknya covid 19 jumlah masyarakat yang hidup susah semakin bertambah 62 orang.

Program pemerintah desa dengan bantuan langsung tunai tidak mampu menyelesaikan persoalan hidup dan belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Timoreng Panua. Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini hanya mampu untuk mengurangi beban hidup masyarakat miskin

namun belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah membuat penulis mengangkat judul : Fungsi pemerintahan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terdampak covid 19 di desa Timoreng Panua Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat. Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat.

Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan (Sitanggang, 1996 :134). Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikehendaki, hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Talidzu Ndraha (2011:98) peranan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah

akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional seperti sebagai berikut:

1. Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat, setiap pilihan berisi janji.
2. Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Kebebasannya itu dilindungi dan dijamin melalui civil service.
3. Jika konsumen telah menjatuhkan pilihan diantara produk yang ditawarkan, maka produsen/penjual (pemerintah) harus menepati janjinya.
4. Untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, konsumen melakukan kontrol sosial terhadap produk yang diterimanya.
5. Jika janji ternyata ditepati, hal itu berarti produsen (pemerintah) bertanggung jawab jika tidak produsen harus bertanggung jawab.
6. Jika produsen (pemerintah) bertanggung jawab, dalam hal konsumen (masyarakat) tumbuh kepercayaan terhadap janji produsen (pemerintah).

B. METODE PENELITIAN

Tipe dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara penuh adalah cara pengambilan sampel dengan pertimbangan peneliti. Teknik pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data menggunakan instrumen penelitian, uji realibilitas, uji validitas, dan skala likert.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil olahan kuisisioner pertama, dapat dilihat bahwa 24 responden atau 32,88% menjawab sangat baik dengan pernyataan pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat sedangkan sebanyak 36 responden atau 49,32% menjawab cukup baik dengan pernyataan pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat., selebihnya sebanyak 13 responden atau 17,81% menjawab kurang baik dengan pernyataan pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat. Hasil rata-rata jawaban responden dari kuisisioner pertama didapatkan 78,77%. Jadi dapat disimpulkan

bahwa pernyataan pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat dinilai sangat baik. Dari hasil olahan kuisisioner kedua, dapat dilihat bahwa 21 responden atau 28,77% menjawab sangat baik dengan pernyataan Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya sedangkan sebanyak 52 responden atau 71,23% menjawab cukup baik dengan pernyataan Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Hasil rata-rata jawaban responden dari kuisisioner kedua didapatkan 82,19%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya dinilai sangat baik. Hasil olahan kuisisioner ketiga, dapat dilihat bahwa 73 responden atau 100% menjawab sangat baik dengan pernyataan Produsen/penjual (pemerintah) harus menepati janjinya Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan Produsen/penjual (pemerintah) harus menepati janjinya dinilai sangat baik.

Hasil kuisisioner empat, dapat dilihat bahwa 17 responden atau 23,29% menjawab sangat baik dengan pernyataan Menguji janji produsen (pemerintah) sedangkan sebanyak 56 responden atau 76,71% menjawab cukup baik dengan pernyataan Menguji janji produsen (pemerintah). Hasil rata-rata jawaban responden dari kuisisioner keempat didapatkan 64,66%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan Menguji janji produsen (pemerintah) dinilai cukup baik. Hasil kuisisioner lima, dapat dilihat bahwa 17 responden atau 23,29% menjawab sangat baik dengan pernyataan Produsen (pemerintah) bertanggung jawab jika tidak produsen harus bertanggung jawab sedangkan sebanyak 26 responden atau 35,62% menjawab cukup baik dengan pernyataan Produsen (pemerintah) bertanggung jawab jika tidak produsen harus bertanggung jawab selebihnya sebanyak 30 responden atau 41,09% menjawab kurang baik dengan pernyataan Produsen (pemerintah) bertanggung jawab jika tidak produsen harus bertanggung jawab. Hasil rata-rata jawaban responden dari kuisisioner kelima didapatkan 56,44%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan Produsen (pemerintah) bertanggung jawab jika tidak produsen harus bertanggung jawab dinilai cukup baik. Dari hasil kuisisioner keenam,

dapat dilihat bahwa 13 responden atau 17,81% menjawab sangat baik dengan pernyataan Tumbuh kepercayaan terhadap janji produsen (pemerintah) sedangkan sebanyak 16 responden atau 21,92% menjawab cukup baik dengan pernyataan Tumbuh kepercayaan terhadap janji produsen (pemerintah). Sedangkan 39 responden atau 53,42% menjawab kurang baik dengan pernyataan Tumbuh kepercayaan terhadap janji produsen (pemerintah) selebihnya sebanyak 5 responden atau 6,85% menjawab tidak baik dengan pernyataan Tumbuh kepercayaan terhadap janji produsen (pemerintah). Hasil rata-rata jawaban responden dari kuisioner keempat didapatkan 62,67%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan Tumbuh kepercayaan terhadap janji produsen (pemerintah) dinilai cukup baik.

Hasil olahan kuisioner pertama, dapat dilihat bahwa 23 responden atau 31,51% menjawab sangat baik dengan pernyataan Fungsi Pemerintahan menjamin rasa aman masyarakat sedangkan sebanyak 50 responden atau 68,49% menjawab cukup baik dengan pernyataan Fungsi Pemerintahan menjamin rasa aman masyarakat. Hasil rata-rata jawaban responden dari kuisioner pertama didapatkan 82,88%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan Fungsi Pemerintahan menjamin rasa aman masyarakat dinilai sangat baik. Dari hasil olahan kuisioner kedua, dapat dilihat bahwa 20 responden atau 28,77% menjawab sangat baik dengan pernyataan Fungsi Pemerintahan menjamin kesejahteraan masyarakat sedangkan sebanyak 53 responden atau 72,60% menjawab cukup baik dengan pernyataan Fungsi Pemerintahan menjamin kesejahteraan masyarakat. Hasil rata-rata jawaban responden dari kuisioner kedua didapatkan 81,85%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan Fungsi Pemerintahan menjamin kesejahteraan masyarakat dinilai sangat baik. Hasil olahan kuisioner ketiga, dapat dilihat bahwa 19 responden atau 26,03% menjawab sangat baik dengan pernyataan Fungsi Pemerintahan menjamin kebebasan dan jati diri masyarakat, sedangkan sebanyak 54 responden atau 73,97% menjawab cukup baik dengan pernyataan Fungsi Pemerintahan menjamin kebebasan dan jati diri masyarakat. Hasil rata-rata jawaban responden dari kuisioner kedua didapatkan 81,51%. Jadi dapat

disimpulkan bahwa pernyataan Fungsi Pemerintahan menjamin kebebasan dan jati diri masyarakat dinilai sangat baik. Pemerintahan secara maksimal dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Covid 19 serta berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memenuhi protokol kesehatan, agar tidak terjadi kegaduhan dalam masyarakat kami bekerjasama dengan pihak kesehatan serta kepolisian untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi pemerintahan di Desa Timoreng Panua dianggap sudah cukup baik dilihat dari hasil rata-rata hitung tabel frekuensi, begitu pula dengan hasil yang diperoleh melalui perhitungan SPSS yang memperlihatkan item pertanyaan dari variabel Fungsi Pemerintahan, dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat berstatus reliabel. Ini terlihat dari Cronbach Alpha yang positif bernilai lebih besar dari 0,5 berkisar antara: 0,945.
2. Fungsi pemerintahan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terdampak Covid 19 di Desa Timoreng Panua dianggap sudah sangat baik dilihat dari hasil rata-rata hitung tabel frekuensi, begitu pula dengan hasil yang diperoleh melalui perhitungan SPSS yang memperlihatkan terdapat pengaruh variabel X (fungsi pemerintahan) terhadap Variabel Y (peningkatan kesejahteraan masyarakat terdampak Covid 19) sebesar 86% terdapat pada output SPSS model Summary.

E. REFERENSI

- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori & Aplikasi*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Anjas Asmara, M. I. (2021). Hubungan Kebijakan dengan Kinerja Aparat Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bulu Timoreng. *JIA*, 117-124.

- Febriani, S. H. (2020). Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi Kasus Pengentasan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Maritengngae). *Jurnal Ilmiah Administrasi (JIA)*, 1-9.
- G, P. I. (2005). *Sosiologi Parawisata*. Yogyakarta: Andi.
- Istianto, B. (2011). *Manajemen pemerintahan dalam perspektif pelayanan publik* . jakarta: Mitra Wacana Media .
- Ndraha, T. (1988). *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nisra, A. U. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA*, 90-97.
- Sahar, G. A. (2021). Fungsi Koordinasi terhadap Pelaksanaan pemerintah di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA*, 28-38.
- Siagian, S. P. (2011). *Filsafat Administrasi. Cetakan Keenam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi*. Jakarta: Rajawali.
- Susanti, L. (2013). *Analisis strategi hedging untuk operating exposure studi kasus pada pt indomobil suzuki international*. Malang : Bagian Proyek OPF IKIP Malang.
- Syarifuddin, A. (2016). *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung: Binacipta.
- Talizuduhu., N. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Thoha, M. (2002). *Dimensi-dimensi Prima Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjokromidjojo, H. B. (2009). *Agenda Akse Reformasi Birokrasi. Administrasi Negara Demokrasi dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Lembaga Admnistrasi Negara.